

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA,
MORALITAS DAN LINGKARAN BELAKANG PENDIDIKAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK PERSEORANGAN BANGUNAN
(STUDI KASUS PADA DESA MADANG KECAMATAN
SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS)**



PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rani Destiana

Nim : 2101020079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSISIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN
TAHUN 2025**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, MORALITAS, DAN
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DESA MADANG KECAMATAN SUMBER HARTA
KABUPATEN MUSI RAWAS)**

Oleh:

Rani Destiana

Nim:2101020079

Lubuk linggau, Januari 2025

Pembimbing 1

pembimbing 2

Eri Triharyati, SE.,M.Si

Dian Wulan Sari,S.E.,M.Ak

Mengetahui

Ketua program studi akuntansi

Dr. Dheo Rimbano, SE.,M.Si

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI



Pada hari kamis tanggal 02 bulan Januari tahun 2025 telah dilaksanakan sidang skripsi oleh program studi akuntansi Universitas bina insan

Nama : Rani Destiana

Nim : 2101020079

Judul Skripsi: Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas)

Komisi Penguji

- 1.ketua : Eri Triharyati, SE.,M.Si (.....)
- 2.sekretaris : Dian Wulan Sari,S.E.,M.Ak (.....)
- 3.anggota : Arisky Andrinaldo, SE.,M.Ak (.....)

Mengetahui

Ketua program studi akuntansi


Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Dan bersabarlah sesungguhnya perintah Allah itu adalah benar”
(Q.S Ar-
- ❖ “Sedari kecil dibentuk untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas diri ini tumbang hanya karna perkataan seseorang”.
- ❖ “Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

PERSEMBAHAN:

- ❖ Teruntuk keluarga besar yang selalu mensuport penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semua doa, usaha dan dukunganya.
- ❖ Teruntuk sahabat terbaikku “bestie edition” dan “wisuda bareng” yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan yang selalu membantu di proses skripsi ini.
- ❖ Teruntuk dosen pembimbing Eri Triharyati, SE.,M.Si dan Dian Wulan Sari,S.E.,M.Ak terimakasih telah membimbing penulis sepenuh hati.
- ❖ Teruntuk Almamater Universitas Bina Insan terimakasih telah menemani selama proses perkuliahan penulis.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini



Nama : Rani Destiana
Nim : 2101020079
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, merupakan hasil kerja keras saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Ada bagian tertentu dari penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika kemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

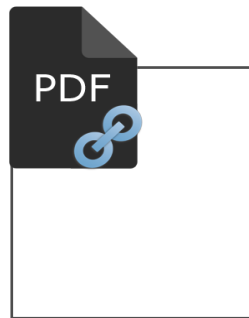
Lubuklinggau, januari 2025

Rani Destiana

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

RIWAYAT HIDUP



Biodata diri

Nama : Rani Destiana
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Harta, 14 Desember 2003
Alamat : Dusun III Desa Suka Maju Kecamatan Sumber
Harta Kabupaten Musi Rawas
Agama : Islam

Pendidikan:

Lulusan:

1.SD : SD Negeri T.1 Bangun Sari
2.SMP : SMP Negeri Sumber Harta
3.SMA : SMA Negeri Purwodadi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa, moralitas dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penentuan terdiri dari 591 responden sedangkan sampel berjumlah 238 responden. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder metode pengumpulan data melalui kerusakan dan observasi data dianalisis dan diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistik versi 26 hasil uji t dan uji F mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepala desa moralitas dan latar belakang pendidikan wajib pajak secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambahkan varian variabel lainnya seperti sanksi pajak pendapatan serta sosialisasi pajak.

Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRACT

PDF



*The aim of this research is to examine the influence of the village head's leadership, morality and educational background of taxpayers on compliance with paying land and building taxes. The research method used is a quantitative method. The research population consisted of 591 respondents while the sample consisted of 238 respondents. The method used for sampling is probability sampling with a simple random sampling technique. The type of data used is primary and secondary data. The data collection method is through damage and observation. The data is analyzed and processed using the help of the IBM SPSS statistics application version 26. The results of the *t* test and *F* test reveal that the leadership of the village head, morals and educational background of taxpayers partially and simultaneously have a significant influence on compliance with paying land and building taxes. For further research, it is hoped that further research can be carried out by adding other variable variants such as income tax sanctions and tax socialization.*

Keywords: Village Head Leadership, Morality and Educational Background of Taxpayers, Compliance with Paying Land and Building Taxes.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan  penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya  memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan program sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Selama proses penulisan dan penyusunan proposal ini, penulis telah berusaha sebaik-baiknya untuk dapat menyelesaikan proposal ini baik tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tentunya sangat diharapkan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu selama proses menyelesaikan proposal ini diantaranya yaitu:

1. Bapak/ibuku yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya dalam penulisan proposal ini
2. Bapak Dr. H. Sardiyo, M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan
3. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.T., M.IT selaku wakil rektor I Universitas Bina Insan.
4. Bapak Wakhid Nur Mukhlis, M.Pd., M.M selaku wakil rektor II Universitas Bina Insan.
5. Bapak Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si selaku dekan fakultas ilmu ekonomi dan sosial humaniora Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Indrawati Mara Kesuma, SE., M.Si selaku kepala program studi Akuntansi fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Eri Triharyati, SE.,M.Ak selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dian Wulan Sari,S.E.,M.Ak selaku pembimbing 11 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak/ibu Arisky Andrinaldo, SE.,M.Ak selaku penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak/ibu pimpinan dan staf karyawan kantor Desa Madang diKecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
11. Seluruh staf dosen dan karyawan Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis

Lubuklinggau, Januari 2025

Rani Destiana

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Halaman judul	i
Halaman pengesaha	ii
Halaman Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Batasan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Literatur	10
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	22
2.3 Kerangka Berpikir	24
2.4 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Variabel Penelitian dan operasionalisasi variabel	29
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Sumber Data	33
3.5 Metode pengumpulan Data	33
3.6 Uji Instrumen Penelitian	35
3.7 Uji Asumsi Klasik	41
3.8 Metode Analisis Data	41
3.9 Tempat Dan Waktu Penelitian	43

D AFTAR TABEL



Table 1 data target realisasi wajib PDB	7
Table 2 peneliti terdahulu yang relevan	22
Tabel 3 definisi operasional variabel	30
Tabel 4 instrumen penelitian	35
Tabel 5 instrumen skala likert	49

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR LAMPIRAN



- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Lembar Bimbingan
- Lampiran 3 Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 kerangka berpikir.....	24
Gambar 2 desain penelitian.....	39

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi, yang mendukung hak dan kewajiban setiap individu, pajak sebagai salah satu kewajiban adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, oleh karena itu warga negara sebagai bagian dari suatu negara diharapkan dapat memiliki andil melalui kontribusi serta partisipasinya dalam pembiayaan negara lewat perpajakan guna meningkatkan pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian (Momuat *et al.*, 2022). Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan Negara. Yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki dua sumber pokok yang digunakan untuk memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri didapatkan dari pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri didapatkan dari setoran non-pajak serta sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat dominan bagi Negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar (Patty & Tehuyao, 2024). Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak (Erlindawati & Novianti, 2020).

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “Motor Penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

berbagai sarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat yang berpartisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimana pun pajak dipungut tidak membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan penerapannya (Sari *et al.*, 2024). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, untuk menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat ada pada daerah tingkat II. Salah satu pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan/pedesaan yang dulunya adalah pajak pusat namun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) berubah menjadi pajak daerah (Sari *et al.*, 2024). Berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan adalah berasal dari pajak bumi dan bangunan, karena PBB merupakan pajak pusat dan tercantum dalam APBN dan hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak (Fujiawati & Rahmi, 2024). Ini adalah pajak yang dikenakan pada orang (wajib pajak) yang memiliki tanah dan bangunan dan memiliki hak atas aset tersebut untuk pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak yang sangat menjanjikan sebagai sumber strategis pendanaan negara untuk pembangunan dan pemerintahan adalah PBB. Meskipun PBB dianggap potensial bagi pembiayaan negara nyatanya masih sulit dilakukannya pemungutan pajak karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak (Afrilia Suma, 2024).

Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukkan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri. Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan Undang-Undang yang termasuk dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: pengenaan dan pembangunan pajak

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

(termasuk bea cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Fujiawati & Rahmi, 2019). Oleh kerana itu sifat pajak yang memaksa mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak.

Kepatuhan pajak berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan terdiri dua macam, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan (Sari *et al.*, 2024). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Khaerunnisa *et al.*, n.d.). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan salah satunya didorong oleh pengaruh kepemimpinan kepala desa.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala desa juga meminta bantuan kepada para pemimpin masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak, memberikan bimbingan dan penerangan kepada

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

wajib pajak mengenai manfaat pajak (Fujiawati & Rahmi, 2024). Suatu kepemimpinan akan berjalan efektif bila mana telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dalam hal ini adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu organisasi bergerak ke arah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti kepemimpinan bukan semata-mata terletak pada kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Selain itu, disinilah figure fungsi kepemimpinan adalah sebagai penggerak dan atau pendorong, fungsi dalam hal ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Sari *et al.*, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati, 2020) bahwa kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Lurah maupun Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan terdepan serta pemerintah-pemerintah yang ada di kelurahan maupun desa yang ada untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya serta masyarakat yang ada agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak (Sari *et al.*, 2024). Selain kepemimpinan kepala desa ada pun faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak adalah moralitas.

Moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Sari *et al.*, 2024). Moralitas perpajakan bisa ditimbulkan dari partisipasi masyarakat, kepercayaan dan kebanggaan serta system perpajakan. Jika wajib pajak telah menanamkan rasa bangga, maka dapat termotivasi sebagai warga negara untuk memikirkan kondisi negara ini. Wajib pajak sangat patuh membayar pajak didorong karena adanya

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perilaku peduli dengan keadaan keuangan negara sehingga partisipasi warga negara yang besar disertai dengan pola pikir yang terbuka untuk memajukan negara (Sularsih & Wikardojo, 2021). Moral pajak menggambarkan pemahaman batin yang mendasari untuk memenuhi kewajiban pajak. Pemahaman wajib pajak justru akan dapat meningkatkan kembali membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kewajiban moral tidak dipaksakan tapi diperintahkan dari dalam hati nurani dan moral pribadi (Sularsih & Wikardojo, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB (Sari *et al.*, 2024). Bukan hanya moralitas kepatuhan wajib pajak dipengaruhi pula dengan latar belakang pendidikan.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat Pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dengan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari (Kasturi *et al.*, 2024). Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kemampuan kerja yang menimbulkan perubahan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), keterampilan dan sikap. Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat berbeda-beda tentu hal ini dapat mempengaruhi dalam kewajiban pembayaran pajak. Selain itu tingkat pendapatan wajib pajak juga mempengaruhi pembayaran pajak, karena pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat bergantung pada pendapatan yang didapat wajib pajak (Erlindawati & Novianti, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi mental dan kemampuan seseorang untuk sadar akan tugas dan tanggung jawab moral dan hukumnya, dan dalam hal membayar PBB. Karena mereka yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan menyerap informasi mengenai kebijakan dan peraturan yang berlaku serta pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara, yang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pelaksanaannya dilakukan secara sadar dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain (Momuat *et al.*, 2020).

Berdasarkan wawancara telah dilakukan peneliti dengan beberapa warga desa pada 4 november di desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Dibeberapa desa pemimpin desa atau yang sering disebut kepala desa masih jarang mengadakan sosialisasi ke masyarakat betapa pentingnya PBB, oleh karna itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam tata cara pembayaran PBB, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat dan juga kesadaran akan kewajiban membayar pajak tersebut. Adapun persoalan yang dihadapi wajib pajak adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya PBB. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa PBB berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam situasi ekonomi yang sulit tidak sedikit masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-harinya dibandingkan harus membayar pajak. Hal tersebut membuat masyarakat mengabaikan kewajiban membayar pajak dengan demikian hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan.

Desa Madang merupakan salah satu desa yang menerapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di kabupaten Musi Rawas, data yang diperoleh desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas menyatakan presensi wajib pajak diperoleh selama 3 tahun yakni tahun 2022-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1

**Daftar Target Realisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Di desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas**

Tahun	WP Terdaftar	WP Patuh	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak Terealisasi %
2022	563	505	18.208.000	1.862.000	10,22%

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2023	569	449	19.774.000	16.164.000	18,25%
2024	591	473	19.000	24.519.000	20,10%

Sumber: desa Madang kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya angka jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas belum mencapai angka maksimal. Pada tahun 2022 banyaknya wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak sejumlah 58 wajib pajak, Sedangkan di tahun 2023 terdapat 120 wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dan di tahun 2024 terdapat 118 wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **pengaruh kepemimpinan kepala desa, moralitas dan latar belakang Pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dikecamatan sumber harta kabupaten musu rawas.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1) **Kepemimpinan Kepala Desa**

Belum optimalnya pemimpin kepala desa dalam menegaskan pembayaran PBB.

2) **Moralitas**

Kurangnya tanggung jawab wajib pajak dalam membayar PBB.

3) **Latar Belakang Pendidikan wajib pajak**

Masih banyak masyarakat yang belum memahami akan pentingnya PBB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- 1) Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB didesa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas?
- 2) Apakah Moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB didesa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas?
- 3) Apakah latar belakang Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB didesa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas?
- 4) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak didesa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Batasan masalah di penelitian ini yaitu Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di desa Madang Kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas periode tahun 2022-2024.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan membayar PBB di desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh moralitas terhadap kepatuhan PBB di desa Madang kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB didesa Madang kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di desa Madang kecamatan Sumber Harta kabupaten Musi Rawas.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah masalah perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi dibidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan penelitian mengenai PBB.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.

3) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat wajib pajak khususnya PBB mengenai arti pentingnya pajak, serta peran masyarakat dalam membangun sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

a. *Theory of moral reasoning*

Pada konteks pajak menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan moral adalah perlakuan pada sanksi. Sehingga, individu yang memiliki moral *reasoning* rendah, penghargaan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan issue keadilan pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang lain. Sehingga semakin tinggi moral pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayaran pajak (Sari *et al.*, 2024). Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol didalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut (Hirani & Silalahi, 2020). Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menggunakan moral akan lebih memiliki pemikiran yang luas yang membuat wajib pajak lebih patuh membayar pajak.

b. Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan PERPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Momuat *et al.*, 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Annaas Aqsha, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kewajiban pembayaran kepada daerah di mana orang atau masyarakat diwajibkan oleh hukum untuk tidak mendapatkan manfaat langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya (Afrilia Suma, 2024). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Aristanti Widyaningsih, 2015).

c. Unsur Pajak

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur khusus dalam pengertian pajak yaitu (Hamidah & Novien, 2023):

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang yang satu ciri utama pajak adalah bahwa pajak harus dipungut secara sah. karena pajak pada dasarnya merupakan beban dari pundak rakyat biasa, maka dalam menyusun jenis, sifat dan besarnya pajak, rakyat harus berbicara dan bersepakat melalui wakil-wakilnya di parlemen negara atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Sifatnya dapat dipaksakan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

fiscus pajak memiliki hak untuk memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dalam memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan dalam Undang-Undang perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

3. Tidak ada kontroversi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak ciri utama pajak adalah wajib pajak yang membayar pajak.

tidak menerima atau menerima apapun dari pemerintah sebagai imbalan atas kompensasi atau balas jasa (tanpa tunjangan khusus yang nilainya sama tanpa mengacu pada tunjangan khusus yang diberikan) jika wajib pajak membayar pajak penghasilan antar pajak akan mengembalikannya.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) pemerintah tidak bermaksud mencari keuntungan dalam memajukan pembangunan sedangkan pihak swasta selalu mencari keuntungan dalam memajukan usaha.

5. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk administrasi dana dari pemungutan pajak yang digunakan atau diidentifikasi sebagai pajak tidak pernah dialokasikan untuk pengeluaran tertentu (Hamidah & Novien, 2023).

d. Ciri Ciri Pajak

Dengan melihat unsur-unsur pajak tersebut maka pajak juga dapat diketahui adanya ciri-ciri yang biasanya ada yaitu (Hamidah & Novien, 2023):

1. Dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah (PERDA) artinya dapat dipaksakan.
2. Dapat berupa pajak langsung (pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah melalui aparturnya) dan pajak tidak (langsung pajak yang pemungutannya melalui pihak ketiga).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan keadaan atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak) atau berulang-ulang (artinya pajak dipungut secara periodik atau terus-menerus).
4. Tanpa ada imbal balik secara langsung dapat ditunjuk (artinya membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan imbal balik yang secara langsung diterima atau dapat ditunjukkan).
5. Sebagai alat pendorong (artinya pajak dapat digunakan untuk mendorong adanya investasi jika ada fasilitas intensif di bidang perpajakan) atau penghambat (artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat pemborosan atau dapat berlaku hemat).
6. Menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan non keuangan (Hamidah & Novien, 2023).

e. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (aristanti widyaningsih, 2015):

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

3. Fungsi Stabilitas

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dan diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi retribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi Demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak (Aristanti Widyaningsih, 2015)

f. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu (Melyanti *et al.*, 2019);

1. menurut golongannya
 - a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. menurut lembaga pemungutan.
 - a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Melyanti *et al.*, 2019).

g. Pajak Bumi dan Bangunan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2018). PBB merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia. Ini adalah pajak yang dikenakan pada orang (wajib pajak) yang memiliki tanah dan bangunan dan memiliki hak atas aset tersebut untuk pemerintah daerah (Afrilia Suma, 2024). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam hal ini wajib pajak harus memahami alur dan sistem dari PBB agar wajib pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan PBB terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak. Oleh sebab itu PBB dikenakan berdasarkan pada keadaan objek pajaknya bukan pada subjeknya. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar atau melunasi kewajiban pajaknya yang dapat dilihat dari semakin besarnya tunggakan yang terjadi dari tahun ke tahun berarti masih banyaknya pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Hirani & Silalahi, 2020).

PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atas

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

memperoleh manfaat dari padanya (Sihombing Sotarduga, 2020;81).

PBB sebagai Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana pembayaran PBB sebagai salah satu media untuk mencapai kerjasama dalam bidang ekonomi serta pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus menghormati prinsip hukum, prinsip keadilan dan prinsip kesederhanaan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta ditunjang juga oleh sistem manajemen perpajakan yang baik. Bumi/tanah dan bangunan memberikan manfaat juga status sosial dan status ekonomi yang lebih baik kepada individu atau badan yang mendapatkan manfaat atas haknya tersebut, sehingga itu sudah seharusnya menjadi kewajiban dari mereka untuk membayar pajak sebagai pembagian dari manfaat yang diterimanya (Momuat *et al.*, 2022).

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek PBB adalah “Bumi dan Bangunan”. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Misalnya, pekarangan, sawah, ladang, kebun, rawa rawa, tambak dan lainnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Misalnya bangunan tempat tinggal, tempat usaha, gedung bertingkat, pusat berbelanja dan lain lain (Akhmad Syarifudin, 2018:193)

h. Kepemimpinan Kepala Desa

1. Pengertian Kepemimpinan Kepala Desa

Luthans (2006) mendefinisikan kepemimpinan sebagai sekelompok proses, kepribadian, pemenuhan, perilaku tertentu, persuasi, wewenang, pencapaian tujuan, interaksi, perbedaan peran, inisiasi struktur, dan kombinasi dari dua atau lebih dari hal-hal tersebut (Sari *et al.*, 2024). Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan dapat dipergunakan oleh individu dan tidak terbatas pada perilaku dalam suatu organisasi kantor tertentu. Atau dengan kata lain, kepemimpinan dapat diterapkan di mana saja, asalkan individu dapat menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya tujuan tertentu. Pada tingkat desa, seorang kepala desa merupakan wakil dari pemerintahan yang memiliki tugas-tugas serta pelayanan yang cukup berat. Pemerintah desa terus berupaya menata sistem perpajakan nasional. Sistem perpajakan nasional dalam hal ini adalah pencerminan rasa keadilan dan kesadaran menyeluruh. Hal ini berarti pajak dikenakan pada objek pajak baik yang besar maupun kecil serta mengikursertakan lapisan masyarakat (Dewi & Hidayatullah, 2020).

2. Indikator Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut (Kurniati, 2020) Kepemimpinan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari:

- a. Keterampilan Profesional, dimana seorang pemimpin memiliki kapasitas dalam membantu masyarakat dilingkungan kerja dan mencapai kinerja terbaik.
- b. Pengambilan Keputusan, proses membuat pilihan dari beberapa pendapat orang sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Apresiasi, suatu bentuk menghargai atas karya orang lain, apresiasi ini dapat diberikan kepada masyarakat atau aparat perangkat desa yang membuat bangga desa setempat.
- d. Motivasi Inspirasi, motivasi yaitu suatu dorongan yang diberikan agar seseorang mau melakukan sesuatu yang bentuknya positif sedangkan inspirasi yaitu dorongan agar seseorang terus berfikir kreatif sesuai dengan minat dan kemampuannya (Sari *et al.*, 2024)

i. Moralitas

1. Pengertian Moralitas.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Menurut KBBI, moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan atau adat sopan santun. Moralitas pajak adalah sikap seorang pajak yang didorong oleh keinginan untuk membayar dan melunasi pajak secara sukarela, karena dianggap sebagai kewajiban moral (Patty & Tehuyao, 2024). Moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Moral pajak merupakan kunci utama yang dapat menjelaskan mengapa individu berlaku jujur khususnya dalam bidang perpajakan (Hidayatulloh *et al.*, 2020). Moral pajak merupakan pemahaman batin yang memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban moral sendiri tidak bersifat memaksa tetapi diperintahkan dari lubuk hati nurani seseorang dan moral pribadi bagi wajib pajak itu sendiri (Faridah Ara, 2022).

2. Indikator Moralitas.

Menurut (Rahayu, 2017) dan (Torgler dan Schneider, 2007) indikator moralitas adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar etika, Dimana terjadi penyimpangan dari norma etika yang berlaku saat diminta untuk membayar PBB.
- b. Rasa bersalah, respon wajib pajak yang muncul setelah menyadari melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.
- c. Prinsip hidup, nilai yang menjadi pemicu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
- d. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, kepercayaan yang melandasi semua masyarakat, hal ini berhubungan dengan wajib pajak terhadap hukum dan mekanisme pemerintahan indonesia serta hubungan terhadap pelaksanaan mekanisme perpajakan indonesia apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan.
- e. Persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan, dimana seberapa besar realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target yang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

seharusnya dicapai sesuai periode tertentu (Sularsih & Wikardojo, 2021).

j. Latar Belakang Pendidikan

1. Pengertian Latar Belakang Pendidikan.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Kasturi *et al.*, 2024). Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan meningkatkan harkat dan martabat (Afrilia Suma, 2024). Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatantingkatan tertentu seperti: 1) Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, 2) Pendidikan lanjut, meliputi pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat dan pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Momuat *et al.*, 2022).

Tingginya tingkat pendidikan seseorang tentunya akan berpengaruh terhadap pola pikir Wajib Pajak dan juga pandangan Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan biasanya akan di dapatkan oleh seseorang ketika menjalani pendidikan formal. Pendidikan sebagai media yang dapat merubah mental masyarakat menjadi lebih positif. Maka dari itu pendidikan mengenai perpajakan harus di berikan sejak dini di lingkungan sekolah. Untuk menjadikan anak anak dan juga para orang tua yang berperan sebagai Wajib PBB akan lebih mengetahui

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengenai pentingnya membayar pajak. Jika Wajib PBB sudah mengetahui mengenai kewajibannya maka mereka pun akan lebih ringan dalam membayar pajak (Utami & Rakhmadhani, 2023). Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap pajak, semakin baik pendidikan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan semakin baik juga kepatuhannya sebagai warga negara dalam membayar PBB. Melalui pendidikan dimungkinkan seseorang untuk lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan, keterampilan, kecakapan, pengalaman, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan juga dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh maka makin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian maka semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka kesadaran membayar PBB akan meningkat (Tapatfeto *et al.*, 2024).

2. Indikator Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak

Indikator tingkat pendidikan terdiri dari:

- a. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
- b. kesesuaian jurusan adalah analisis tingkat pendidikan dan jurusan yang diambil seseorang untuk menentukan posisi yang sesuai dengan kemampuan (Kasturi *et al.*, 2024).

k. Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Kepatuhan

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.03 Tahun 2012), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, maupun ancaman.

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Kepatuhan pada peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Perundang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi perpajakan (Dewi & Hidayatullah, 2020). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari *et al.*, 2024).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. (Afrilia Suma, 2024). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Hirani & Silalahi, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak, dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (samosir *et al.*, 2023).

2. Indikator Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT, membayar pajak dengan dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT yang oleh pemerintah daerah.
- b. Tidak pernah meggakan pajak, seorang wajib pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tidak memiliki utang pajak kepada negara maupun pemerintah daerah.
- c. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu, melunasi PBB sebelum atau pada batas waktu yang telah ditentukan dalam SPPT.
- d. Membuat surat sertifikat tanah, Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah dan bangunan (Sari *et al.*, 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian yang terdahulu merupakan salah satu acuan dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Sebab penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memahami teori yang akan digunakan dalam sebuah kajian penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan berbagai penelitian terdahulu yang signifikan dengan pennisitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, adapun contoh beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian dan Tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Widia Eka Sari, Muhammad Fahmi, Gumulya Sonny Marcel Kusuma, Ida Zuraidah,2024)	Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Kuantitatif	morlitas dan kepemimpinan kepala desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.
2	Elvita Hirani,	Pengaruh	Kuantitatif	Terdapat pengaruh

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Alistraja Dison Silalahi,2020	kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pajak dan retribusi daerah kota medan.		antara kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib PBB pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.
3 Praysie Momuat, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel,2022	Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan.	Kuantitatif	Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Membayar PBB. Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Membayar PBB. Kepercayaan pada Otoritas Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Membayar PBB.
4 R. Andro Zylion Nugraha, Arief Nurrohman, Agatha Saputri, Caesar Rosyad Achmadi,2024	<i>The Effect Of Understanding Tax Regulations, The Use Of Technology, Tax Penalties, And Education Background</i>	<i>Quantitative</i>	<i>Based on the test results and discussion carried out, conclusions can be drawn, namely: knowledge of tax regulations (X₁), utilisation of information</i>

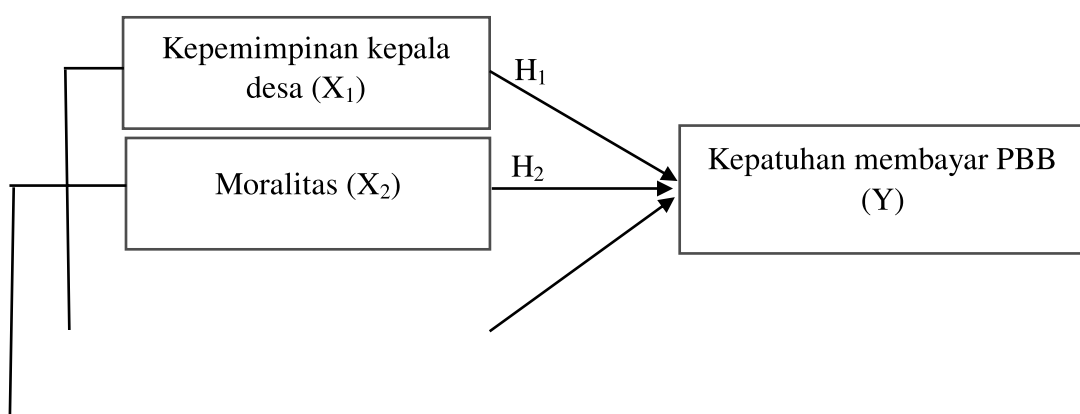
Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

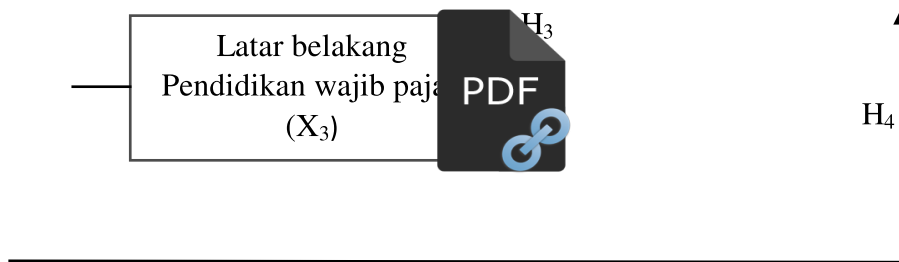
	On The Compliance Of UMK Taxpayers Yogyakarta		technology (X_2), implementation of tax sanctions (X_3) and level of education (X_4) have an influence on the compliance of MSME taxpayers in the Special Region of Yogyakarta
5	Amir Hamzah, Anisa Laila Rahayu, Hasna Firyal Khaerunnisa, Riskha, Dziko Hilyatul Aulia, 2023	<i>Factors Affecting Community Participation in Paying Land and Building Tax in Kuningan Regency.</i>	<i>Quantitative Based on the results of data analysis and hypothesis testing, it can be concluded that tax literacy, community attitudes and the leadership of the village head jointly influence community participation in paying land and building tax.</i>

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini disusun untuk memberikan gambaran dari alur penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan dikecamatan sumber harta kabupaten musi rawas, dimana indikator dari variabel (X_1) kepemimpinan kepala desa (X_2) Moralitas (X_3) Latar Belakang Pendidikan wajib pajak, mempengaruhi indikator dari variabel (Y) kepatuhan terhadap membayar pajak bumi dan bangunan. Agar tercapai kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan kerangka berpikir berikut:



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

- a) Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepala desa berperan penting dalam hal perpajakan, khusus PBB. Sebagaimana PBB adalah merupakan pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Mengingat PBB menyentuh dan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan maka adanya ketentuan yang mudah dimengerti, sederhana dan jelas, menjadi sangat diperlukan (Sari *et al.*, 2024). Seorang kepala desa merupakan wakil dari pemerintahan yang memiliki tugas-tugas serta pelayanan yang cukup berat. Kepala desa berusaha untuk menata sistem perpajakan nasional yang meliputi pencerminan rasa keadilan dan kesadaran menyeluruh. Sehingga, pajak dikenakan atas objek pajak baik yang memiliki skala besar maupun kecil, serta mengikut sertakan lapisan masyarakat (Dewi & Hidayatullah, 2020). Kepemimpinan adalah suatu kemampuan, proses, atau fungsi, untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pada tingkat ilmiah, kepemimpinan dipandang sebagai fungsi dan tujuannya, bukan sebagai posisi atau kepribadian seseorang. Kepala Desa dalam fungsinya sebagai panutan, pemimpin, pemberi semangat, dan pendorong bagi masyarakatnya agar mau bekerjasama secara sukarela demi mencapai tujuan bersama (Hilda *et al.*, 2023). Semakin baik kepemimpinan kepala desa, semakin tinggi tingkat

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati, 2020) bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar



Maka dari pernyataan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

- b) Pengaruh moralitas terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Moralitas perpajakan merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan pembayaran pajak. Moralitas perpajakan bisa dibangun lewat partisipasi masyarakat, kepercayaan, dan kebanggaan, serta sistem perpajakan, jika wajib Pajak telah menanamkan rasa bangga, maka dapat termotivasi sebagai warga negara untuk memikirkan kondisi negara ini. Wajib pajak sangat patuh membayar pajak didorong karena adanya perilaku peduli dengan keadaan keuangan negara sehingga partisipasi warga negara yang besar disertai dengan pola pikir yang terbuka untuk memajukan negara (Sularsih & Wikardojo, 2021). Semakin tinggi tingkat moralitas wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar PBB. Hal ini sejalan dengan penelitian (Agustina, 2024) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan hiipotesis sebagai berikut:

H₂ : moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

- c) Pengaruh latar belakang Pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi social, ekonomi dan politik di Nederland maupun di Hindia Belanda. Selain itu kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipertimakan pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberi kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak (Erlindawati & Novianti, 2020). Pendidikan merupakan tempat yang sangat tepat untuk memperkenalkan ilmu tentang pajak yang dapat menyebabkan pengetahuan mengenai pajak, kewajiban mengenai pembayaran pajak dan pentingnya memenuhi iuran pajak sudah dipahami sejak kecil. Tingkat pendidikan Wajib Pajak yang semakin tinggi akan menyebabkan Wajib Pajak lebih memahami mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan (Utami & Rakhmadhani, 2023). Menurut Rahman (2018:6) pendidikan wajib pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak dalam membangun sikap dan tatalaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara (samosir *et al.*, 2023).

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah akan membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Nim *et al.*, 2019). Pendidikan merupakan tempat yang sangat tepat untuk memperkenalkan ilmu tentang pajak yang dapat menyebabkan pengetahuan mengenai pajak, kewajiban mengenai pembayaran pajak dan pentingnya memenuhi iuran

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pajak sudah dipahami sejak kecil. Tingkat pendidikan Wajib Pajak yang semakin tinggi akan menyebabkan Wajib Pajak lebih memahami mengenai ketentuan dan aturan perpajakan hal ini sejalan dengan penelitian (fadhila, 2021; Nurhikmah, 2023) yang menyatakan bahwa latar belakang Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Latar belakang Pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

- d) Pengaruh kepemimpinan kepala desa, Moralitas dan Latar belakang Pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hipotesis ini berasumsi bahwa tidak hanya masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tetapi juga bagaimana ketiga faktor ini saling berinteraksi. Misalnya, kepala desa yang memiliki kepemimpinan yang baik mungkin lebih mampu memotivasi wajib pajak dengan latar belakang ekonomi yang kurang mapan atau moralitas yang rendah untuk membayar pajak, dengan memberikan informasi dan fasilitas yang lebih baik. Sedangkan, moralitas yang baik bisa memperkuat dampak positif dari kepemimpinan kepala desa dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan.

Maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan Hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemimpinan kepala desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



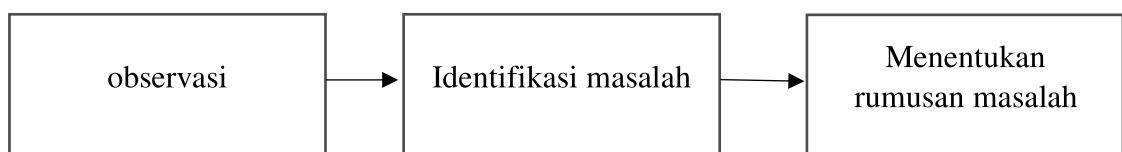
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh kepemimpinan kepala desa, moralitas dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan sumber harta kabupaten musi rawas.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya membuat instrumen penelitian berupa angket, wawancara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 2 Desain Penelitian

3.2 Definisi Variabel Penelitian dan Oprasionalisasi Variabel

Berikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian peneliti:

b. Variabel Penelitian

1. Variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat)
 - 1.6 Variabel X_1 adalah pengaruh kepemimpinan kepala desa sebagai variabel bebas pertama.
 - 1.7 Variabel X_2 adalah moralitas sebagai variabel bebas kedua.
 - 1.8 Variabel X_3 adalah latar belakang Pendidikan wajib pajak sebagai variabel bebas ketiga.
2. Variabel dipenden atau variabel terkait(Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian peneliti adalah kepatuhan wajib PBB.

b. Definisi Oprasionalisasi Variabel

Untuk pemahaman mengenai variabel variabel yang digunakan dalam penelitian, berikut ini akan disampaikan definisi oprasionalisasi variabel sebagai berikut:

Table 3 Definisi Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan	Kepatuhan perpajakan	KepatuhanWajib	likert

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Wajib PBB(Y)	merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	PBB dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari : 1. membayar PBB sesuai SPPT, 2. tidak pernah memiliki tunggakan pajak, 3. membayar PBB tepat waktu. 4. membuat surat sertifikat tanah	
Kepemimpinan Kepala Desa (X ₁)	Luthans (2006) mendefinisikan kepemimpinan sebagai sekelompok proses, kepribadian, pemenuhan, perilaku tertentu, persuasi, wewenang, pencapaian tujuan, interaksi, perbedaan peran, inisiasi struktur, dan kombinasi dari dua atau lebih dari hal-hal tersebut	Menurut (Kurniati, 2020) Kepemimpinan dibentuk oleh beberapa indikator yang terdiri dari: 1. Keterampilan Profesional, 2. Pengambilan Keputusan, 3. Apresiasi, 4. Motivasi Inspirasi.	likert
Moralitas (X ₂)	moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Moral pajak merupakan kunci utama yang dapat	Menurut (Rahayu, 2017) dan (Torgler dan Schneider, 2007) indikator moralitas adalah sebagai berikut: 1. Melanggar etika. 2. Rasa bersalah, 3. Prinsip hidup, 4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan,	likert

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

<p>Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X₃)</p>	<p>menjelaskan mengapa individu itu jujur khususnya dalam bidang per- Menurut SISDIKN Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p>	<p>5. Persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan Indikator tingkat pendidikan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan 2. dan kesesuaian jurusan.
--	--	---

Sumber: Data diolah, 2025

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk membuat skripsi yang bersifat kuantitatif (Rimbano *et al.*, 2022). Penelitian ini berjudul pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan didesa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Populasi pada penelitian ini ialah semua wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang terdaftar di tahun 2024 terdapat 591 wajib pajak yang terdaftar.

b. Sampel

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Rimbano *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar pajak di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas yang diambil menggunakan rumus, dengan taraf kesalahan besar 5%.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{591}{1+591(0,05)^2}$$

$$n = \frac{591}{1+1,4775}$$

$$n = 238,546$$

$$= 238 \text{ (Dibulatkan)}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N: Populasi

e: Error

3.4 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 68 peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus *focus grup discussion* (FGD) dan penyebaran kuesioner (Rimbano *et al.*, 2022)
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, dan lain-lain (Rimbano *et al.*, 2022)



3.5 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peran yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif (Rimbano *et al.*, 2022)

b. Kuisisioner

Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuisisioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuisisioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. Prosedur penyusunan kuisisioner:

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuisisioner.
2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuisisioner.
3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik dan tunggal.
4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya.

Penentuan sampel sebagai responden kuisisioner perlu mendapat perhatian pula. Apabila salah menentukan sampel, informasi yang kita butuhkan barangkali tidak kita peroleh secara maksimal.

c. Wawancara

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui luring/online/offline dan tanya jawab langsung antara penelitian/penyurvei dengan sumber. Adapun secara daring (online) dapat dilakukan dengan cara: telepon, email, atau video melalui zoom, skype, googlemeet (Widodo *et al.*, 2023)

d. Dokumentasi

Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/ muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Rimbano *et al.*, 2022).

3.6 Uji Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Uji instrumen penelitian dimaksudkan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada item-item pertanyaan. Uji instrument penelitian dapat dilakukan pada calon responden atau kelompok lain diluar responden.

Tabel 4. Instrumen penelitian

No	Keterangan	Indikator	Jumlah
----	------------	-----------	--------

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

		pernyataan
1	Kepemimpinan kepala desa (X ₁)	<p>1. Kemampuan rampilan Profesional, sebagai seorang pemimpin memiliki kapasitas dalam membantu masyarakat dilingkungan kerja dan mencapai kinerja terbaik. 3</p> <p>2. Pengambilan Keputusan, proses membuat pilihan dari beberapa pendapat orang sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.</p> <p>3. Apresiasi, suatu bentuk menghargai atas karya orang lain, apresiasi ini dapat diberikan kepada masyarakat atau aparat perangkat desa yang membuat bangga desa setempat. 3</p> <p>4. Motivasi Inspirasi, motivasi yaitu suatu dorongan yang diberikan agar seseorang mau melakukan sesuatu yang bentuknya positif sedangkan inspirasi yaitu dorongan agar seseorang terus berfikir kreatif sesuai dengan minat dan kemampuannya 3</p>
2	Moralitas (X ₂)	<p>1. Melanggar etika, Dimana terjadi penyimpangan dari norma etika yang berlaku saat diminta untuk membayar PBB. 4</p> <p>2. Rasa bersalah, respon wajib pajak yang muncul setelah menyadari melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. 3</p> <p>4</p>

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Prinsip hidup, nilai yang

menjadi pemicu dalam
melakukan kehidupan
hari.

4. Bagaimana kepercayaan
terhadap sistem hukum

dan pemerintahan,

kepercayaan yang

melandasi semua

masyarakat, hal ini

berhubungan dengan

wajib pajak terhadap

hukum dan mekanisme

pemerintahan indonesia

serta hubungan terhadap

pelaksanaan mekanisme

perpajakan indonesia

apakah sudah sesuai

dengan yang ditetapkan.

5. Persepsi tentang

efektivitas sistem

perpajakan, dimana

seberapa besar realisasi

penerimaan pajak berhasil

mencapai target yang

seharusnya dicapai sesuai


periode tertentu

3

2

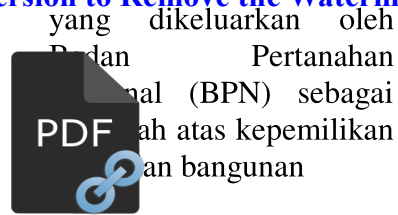
3

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3	Latar belakang pendidikan wajib pajak (X ₃)	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis pendidikan adalah analisis pendidikan yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 2. kesesuaian jurusan adalah analisis tingkat pendidikan dan jurusan yang diambil seseorang untuk menentukan posisi yang sesuai dengan kemampuan 	3
4	Kepatuhan membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT, membayar pajak sesuai dengan dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 2. Tidak pernah memiliki tunggakan pajak, seorang wajib pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya tepat waktu dan tidak memiliki utang pajak kepada negara maupun pemerintah daerah. 3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu, melunasi PBB sebelum atau pada batas waktu yang telah ditentukan dalam SPPT. 4. Membuat surat sertifikat tanah, Dokumen resmi 	3 3 3

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



yang dikeluarkan oleh
Badan Pertanahan
Nasional (BPN) sebagai
bukti atas kepemilikan
tanah dan bangunan

3

3

Sumber: Data diolah, 2025

Dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran skala likert digunakan Untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Tingkat kesetujuan ini pada umumnya dibagi atas lima angkatan yaitu:

Tabel 5. Instrumen skala likert

No	Pilihan jawaban	skore
1	Sangat setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data diolah, 2025

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Untuk dapat menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur, dapat dilakukan dari dua segi, yaitu : dari segi tes itu sendiri sebagai totalitas, dan dari segi itemnya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tes tersebut (Rimbano *et al.*, 2022)

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y

N : jumlah subjek

$\sum xy$: jumlah perkalian antara skor x dan skor y

$\sum x$: jumlah total x

$\sum y$: jumlah total y

$\sum x^2$: jumlah dari kuadrat x

$\sum y^2$: jumlah dari kuadrat y

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely yang artinya percaya dan reliabel yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Test hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten (Rimbano *et al.*, 2022)

$$r = \frac{k}{(k-1)} \left\{ \frac{\sum s^2}{(s^2)} \right\}$$

Keterangan:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

r : koefisien reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir soal atau banyaknya soal

$\sum s^2$: total varian butir

s^2 : total varian



3.7 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah cara untuk menetapkan apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari populasi tertentu dengan distribusi normal. Uji normalitas digunakan dalam melakukan uji hipotesis statistik parametrik. Sebab, dalam statistik parametrik diperlukan persyaratan dan asumsi-asumsi. Salah satu persyaratan dan asumsi adalah bahwa distribusi data setiap variabel penelitian yang dianalisis harus membentuk distribusi normal. Jika data yang dianalisis tidak berdistribusi normal, maka harus dianalisis menggunakan statistik nonparametrik (Setyo Budiwanto, 2017)

b. Uji Linearitas

Pengujian linieritas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa rata-rata yang diperoleh dari kelompok data sampel terletak dalam garis-garis lurus. Kriteria pengujiannya adalah kelinieran dipenuhi oleh data jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai Sig (0,05Sig), berarti model regresi tidak linier (Sahir, 2022).

3.8 Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi saat melakukan suatu penelitian. Kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atau permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

1. Uji Regresi Linier Sederhana

Menurut (Reza, 2021) analisis regresi linier sederhana merupakan Teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dari satu variabel bebas (variabel independent).

Rumus:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : kesadaran

a : konstanta

b1b2: koefisien regresi

X^1 : Pengaruh kepemimpinan kepala desa

X^2 : kepatuhan



2. Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independent.

3. Koefisien Determinan

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dinotasikan dengan R^2 atau kuadrat koefisien determinasi persial. Namun menggunakan koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu kecenderungan terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam mode, setiap tambahan variabel memiliki dampak besar pada variabel dependen oleh karena itu, banyak peneliti merekomendasikan menggunakan R^2 yang disesuaikan atau adjusted R^2 dalam mengevaluasi mode regresi terbaik.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai Koefisien Determinan

R = Nilai Koefisien Korelasi

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis, guna mengetahui arah hubungan antara variabel bebas/independen dan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

variabel terikat/dependen juga untuk memprediksi nilai variabel dependen

apabila terjadi kenaikan atau penurunan dari variabel independen.

$$Y = a + b^1x^1 + b^2x^2 + \dots + e$$

Diketahui:

Y = Kemauan membayar pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi variabel bebas

X¹ = kepemimpinan kepala desa

X² = moralitas

X³ = latar belakang wajib pajak

e = error

5. Uji Parsial (uji T)

Uji t atau uji individual digunakan untuk menguji secara parsial dan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Erlindawati & Novianti, 2020). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t_{hitung} : nilai hitung

r : nilai koefisien korelasi pearson

r^2 : koefisien determinan

n : jumlah responden

6. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan (bersamasama) terhadap variabel dependen. Penelitian dalam penelitian ini memakai tingkat signifikan α 0,05 atau 5% bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima berarti semua variabel berpengaruh terhadap motivasi masyarakat (Erlindawati & Novianti, 2020). Adapun rumusan yang digunakan sebagai berikut:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$f_{hitung} = \frac{r^2/K}{(1-r^2)/(n-K-1)}$$

Keterangan:

f_{hitung} : f_{hitung} yang selibanding f_{tabel}

r^2 : koefisien korelasi

K : jumlah variabel bebas

N : jumlah responden

3.9 Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

No	kegiatan	Tahun 2024-2025				
		okt	nov	des	jan	feb
1	Pengajuan judul	■				
2	Pembuatan proposal	■				
3	Pengajuan dan perbaikan proposal		■			
4	Seminar proposal		■			
5	Pengumpulan data			■		
6	Pengelolaan data			■		
7	Pengajuan bab I, II, III				■	
8	Pengajuan bab IV, V				■	
9	Perbaikan bab IV, V				■	■
10	Ujian skripsi					■

Sumber: Data diolah, 2025

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Madang adalah sebuah Desa diwilayah Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan Indonesia, Desa ini terbagi menjadi 7 dusun. Desa Madang memiliki berbagai potensi baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu sumber daya Desa Madang adalah perladangan dan perkebunan dimana sebagian besar mata pencarian penduduk adalah petani. Desa madang ini memiliki sarana pendidikan 2 TK (TK 1 dan TK 2) dan 2 SD (SD N madang dan SD N

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Trans Madang) sementara untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas untuk didesa madang belum ada. Untuk tempat beribadah di Desa I memiliki 3 masjid dan 9 musholah namun untuk gereja tidak ada karena mayoritas warga setempat adalah ber agama islam.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum uji statistik dilakukan, item pernyataan akan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas. Data yang diuji berasal dari variabel bebas yaitu Kepemimpinana Kepala Desa, Moralitas, Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak dan variabel tetap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana uji validitas dan reliabilitas diuji diluar populasi atau sampel yaitu 25 responden dari Desa Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh indikator-indikator yang membentuk konsep dapat dapat mewakili variabel yang dibentuk dalam penelitian. Sebuah konsep dapat mewakili variabel yang dibentuk apabila nilai *corrected item total correlation* (skor korelasi) $> 0,380$ dengan nilai alpha 5% jika hasil uji dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , dengan taraf signifikan ($\alpha 5\%$)

Table 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X_1)

No	Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel} $\alpha=0,05$ $N=25$	Ket
1	Kepala desa memiliki ketrampilan profesional sehingga desa semakin maju dalam pembangunan.	0,425	0,380	Valid
2	Kepala Desa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang PBB.	0,475	0,380	Valid

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3	Kepala Desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan ketentuan PBB.	0,555	0,380	Valid
4	Kepala desa bertanggung jawab mengambil keputusan yang tepat.	0,567	0,380	Valid
5	apakah kepala desa berpengaruh dalam mempertanggung jawabkan keputusan/kebijakan terhadap masyarakat yang malas bayar PBB.	0,459	0,380	Valid
6	Kepala desa selalu memberi penjelasan yang cukup terkait alasan di balik keputusan mengenai PBB	0,814	0,380	Valid
7	Apresiasi yang diberikan kepala Desa seperti sertifikat penghargaan atas kepatuhan sebagai WP membuat saya termotivasi untuk membayar PBB	0,589	0,380	Valid
8	Kepala desa memberikan apresiasi terhadap partisipasi warga dalam membayar pajak.	0,532	0,380	Valid
9	Kepala desa dapat memberikan inspirasi kepada warga untuk tepat waktu membayar pajak	0,456	0,380	Valid
10	Apakah kepala desa aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membayar PBB	0,431	0,380	Valid
11	apakah kepala desa berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk pembayaran PBB	0,624	0,380	Valid
12	Kepemimpinan kepala desa yang inspiratif dan taat kepada kewajibannya seperti membayar PBB membuat saya termotivasi untuk membayar PBB.	0,404	0,380	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa yang dilakukan pada 25 responden nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 25 orang ($n=25$) pada tingkat signifikan fungsi 0,05 atau 5% adalah 0,380 untuk variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X_1) seluruh pernyataan mendapatkan nilai *corrected item – total corelation* (r_{hitung}) yang lebih tinggi dari r_{tabel} dengan nilai terendah r_{hitung} sebesar 0,425 dibandingkan dengan r_{tabel} 0,380, hal ini

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dianggap valid dan dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya

Table 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas (X_2)

No	Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel} $\alpha=0,05$ $N=25$	Ket
1	Tunduk/mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang tidak melanggar etika	0,620	0,380	Valid
2	Saya merasa tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika saya tahu bahwa beberapa orang lain tidak membayar pajak dengan benar.	0,631	0,380	Valid
3	Saya percaya bahwa orang yang melanggar etika dalam pembayaran PBB seharusnya dihukum atau diberi sanksi.	0,608	0,380	Valid
4	Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan	0,610	0,380	Valid
5	Saya merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya	0,645	0,380	Valid
6	Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan	0,414	0,380	Valid
7	Tidak adanya pejabat yang korupsi atau melakukan tugasnya dengan baik	0,591	0,380	Valid
8	Saya percaya bahwa dana yang saya keluarkan untuk wajib pajak digunakan sebagaimana mestinya	0,524	0,380	Valid
9	Saya merasa sistem perpajakan, termasuk pembayaran PBB, sudah cukup jelas dan mudah dipahami.	0,478	0,380	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa variabel Moralitas (X_2) yang dilakukan pada 25 responden nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 25 orang ($n=25$) pada tingkat

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

signifikan fungsi 0,05 atau 5% adalah 0,380 untuk variabel Moralitas (X_2) seluruh pernyataan mendapatkan nilai *corrected item – total correlation* (r_{hitung}) yang lebih tinggi dengan nilai terendah r_{hitung} sebesar 0,414 dibandingkan dengan r_{tabel} , hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dianggap valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data selanjutnya

Table 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3)

No	Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel} $\alpha=0,05$ $N=25$	Ket
1	Pendidikan formal membantu memberi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan	0,561	0,380	Valid
2	Pendidikan saya yang berkaitan dengan ekonomi memberi saya pemahaman lebih baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	0,556	0,380	Valid
3	Pendidikan yang saya terima memengaruhi cara saya memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, termasuk membayar PBB.	0,380	0,380	Valid
4	Saya merasa lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban membayar PBB berkat pengetahuan yang saya peroleh dari jurusan saya.	0,392	0,380	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3) yang dilakukan pada 25 responden nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 25 orang ($n=25$) pada tingkat signifikan fungsi 0,05 atau 5% adalah 0,380 untuk variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3) seluruh pernyataan mendapatkan nilai *corrected item – total correlation* (r_{hitung}) yang lebih tinggi dari r_{tabel} dengan nilai terendah r_{hitung} sebesar 0,380 sama dengan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

r_{tabel} 0,380, hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dianggap valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data selanjutnya.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas r_{tabel} Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

No	Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel} $\alpha=0,05$ $N=25$	Ket
1	Saya mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku	0,492	0,380	Valid
2	Saya menyetorkan SPT tahunan tepat waktu atau tidak melebihi jatuh tempo	0,566	0,380	Valid
3	Saya selalu menerima SPPT dengan cermat dan memeriksa apakah semua informasi di dalamnya sudah benar sebelum membayar.	0,499	0,380	Valid
4	Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan penunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak.	0,660	0,380	Valid
5	Saya selalu pembayaran PBB tepat waktu tanpa ada tunggakan.	0,496	0,380	Valid
6	Saya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu	0,417	0,380	Valid
7	Saya tepat waktu melaporkan spt tahunan	0,574	0,380	Valid
8	Saya memiliki surat sertifikat tanah yang sah sebagai bukti kepemilikan properti yang saya bayar PBB-nya.	0,430	0,380	Valid
9	Saya percaya bahwa sertifikat tanah adalah salah satu dokumen penting yang mempengaruhi kewajiban saya untuk membayar PBB.	0,436	0,380	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) yang dilakukan pada 25 responden nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 25 orang ($n=25$) pada tingkat signifikan fungsi 0,05 atau 5% adalah 0,380 untuk variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) seluruh pernyataan mendapatkan nilai *corrected item – total correlation* (r_{hitung}) yang lebih

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tinggi dari r_{tabel} dengan nilai terendah r_{hitung} sebesar 0,417 dibandingkan dengan r_{tabel} 0,380, hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dianggap valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data selanjutnya.



b. Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas instrument dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab instrument sebagai alat ukur. Dalam uji reliabilitas pengujian menggunakan SPSS 26 dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* (α) $>$ 60. Pengujian reliabilitas dilakukan di desa paduraksa sebanyak 25 orang. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4.5 hasil uji reliabilitas.

variabel		Cronbach's Alpha	N of Items	Nilai r_{tabel} $\alpha=0,05$ $N=25$	Keterangan
Kepemimpinan Desa (X_1)	Kepala	0,838	13	0,380	Reliabel
Moralitas (X_2)		0,777	15	0,380	Reliabel
Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3)	Belakang	0,617	6	0,380	Reliabel
Kepatuhan Pajak(Y)	Membayar	0,724	12	0,380	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dari perhitungan uji reliabilitas variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X_1) Diperoleh nilai $r_{hitung} = 0,838 > r_{tabel} = 0,380$ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada penelitian ini memiliki tingkat Reliabilitas yang kuat. Dari perhitungan uji reliabilitas variabel Moralitas (X_2) diperoleh nilai $r_{hitung} = 0,777 \geq r_{tabel} = 0,380$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada penelitian ini memiliki tingkat Reliabilitas yang kuat.

Dari perhitungan uji reliabilitas variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3) diperoleh nilai $r_{hitung} = 0,617 \geq r_{tabel} = 0,380$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada penelitian ini memiliki tingkat Reliabilitas yang kuat. Dari perhitungan uji reliabilitas variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) diperoleh nilai $r_{hitung} = 0,724 \geq r_{tabel} = 0,380$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada penelitian ini memiliki tingkat Reliabilitas yang kuat.

4.2.2 Deskripsi Karakter Responden

Analisis Deskripsi Identitas data frekuensi dari responden yang terdiri dari jenis kelamin, Usia dan Pendidikan terakhir responden. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari responden peneliti yang terdiri dari 238 orang, kemudian dibuat frekuensi dengan menggunakan *software computer SPSS 26.0 For Windows*.

a. Frekuensi jenis kelamin responden

Gambaran secara deskriptif mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.6 Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	persentase
Laki laki	217	91,17
Perempuan	21	8,83
total	238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab kuisisioner adalah responden yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 217 orang atau sebesar 91,17% dan responden perempuan sebanyak 21 orang atau sebesar 8,83%. Jadi yang paling banyak adalah jenis kelamin laki laki sebanyak 217 orang atau sebesar 91,17%. Hal ini dikarenakan sebagian besar berjenis kelamin laki laki

b. Frekuensi usia

Gambaran responden berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 usia responden.

Usia	Frekuensi	persentase
< 30 tahun	30	12,60
30 tahun-50 tahun	166	69,75
> 50 tahun	42	17,65
total	238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Dilihat dari data yang dihasilkan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Usia responden yang < 30 tahun sebanyak 30 orang atau 12,60%. Usia responden yang berusia 30 tahun – 50 tahun sebanyak 166 orang atau 69,75%. Usia responden yang berusia > 50 tahun sebanyak 42 orang atau 17,65%. Jadi paling dominan Usia 30 tahun – 50 tahun sebanyak 166 orang atau 69,75%

c. Pendidikan terakhir responden

Gambaran responden berdasarkan Pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	persentase
SD	96	40,33
SMP	92	38,66
SMA	48	20,17
S1/S2/S3	2	0,84

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Total 238 100

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (2025)

Dilihat dari data yang disajikan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan terakhir responden SD sebanyak 96 orang 40,33%. SMP sebanyak 92 orang 38,66%. SMA sebanyak 48 orang 20,17%. S1/S2/S3 sebanyak 2 orang 0,48%. Jadi paling dominan adalah SD sebanyak 96 orang 40,33%.

2.2.3 Deskripsi Jawaban Responden

a. Analisis Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X_1)

Untuk mengetahui masing-masing jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban dihitung dengan menggunakan program SPSS 26.0 *For Window*, dan untuk masing-masing jawaban responden diberi skor berdasarkan *skala likert* sebagai berikut:

1. Jika jawaban (Sangat Setuju) maka skor jawaban dengan nilai=5
2. Jika jawaban (Setuju) maka skor jawaban dengan nilai=4
3. Jika jawaban (Netral) maka skor jawaban dengan nilai=3
4. Jika jawaban (Tidak Setuju) maka skor jawaban dengan nilai=2
5. Jika jawaban (Sangat Tidak Setuju) maka skor jawaban dengan nilai=1

Tabel 4.9 Kepala desa memiliki keterampilan profesional sehingga desa semakin maju dalam pembangunan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	108	45,38
2	Setuju	81	34,03
3	Netral	30	12,61
4	Tidak Setuju	17	7,14
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala desa memiliki

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

keterampilan profesional sehingga desa semakin maju dalam pembangunan. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 108 responden (45,38%) yang menyatakan Setuju sebanyak 81 responden (34,03%), yang menyatakan Netral sebanyak 27 responden (12,61%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 17 responden (7,14%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan sangat setuju bahwa Kepala desa memiliki keterampilan profesional sehingga desa semakin maju dalam pembangunan sebanyak 108 responden (45,38%).

Tabel 4.10 Kepala Desa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang PBB.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	74	31,10
2	Setuju	120	50,42
3	Netral	27	11,34
4	Tidak Setuju	15	6,30
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala Desa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 74 responden (31,10%) yang menyatakan Setuju sebanyak 120 responden (50,42%), yang menyatakan Netral sebanyak 27 responden (11,34%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 15 responden (6,30%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Kepala Desa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi tentang PBB sebanyak 120 responden (50,42%).

Tabel 4.11 Kepala Desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan ketentuan PBB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	70	29,41
2	Setuju	115	48,32
3	Netral	35	14,71
4	Tidak Setuju	17	7,14
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala Desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan ketentuan PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 70 responden (29,41%) yang menyatakan Setuju sebanyak 115 responden (48,32%), yang menyatakan Netral sebanyak 35 responden (14,71%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 17 responden (7,14%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Kepala Desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan ketentuan PBB sebanyak 115 responden (48,32%).

Tabel 4.12 Kepala desa bisa mengambil keputusan yang tepat.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	67	28,15
2	Setuju	123	51,68
3	Netral	35	14,71
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala desa bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 67 responden (28,15%) yang menyatakan Setuju sebanyak 123 responden (51,68%), yang menyatakan Netral sebanyak 35 responden (14,71%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

setuju bahwa Kepala desa bisa mengambil keputusan yang tepat sebanyak 123 responden (51,68%)

Tabel 4.13 apakah kepala desa berpengaruh dalam mempertanggung jawabkan keputusan/kebijakan terhadap masyarakat yang malas bayar PBB.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	54	22,69
2	Setuju	135	56,72
3	Netral	38	15,97
4	Tidak Setuju	9	3,78
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai apakah kepala desa berpengaruh dalam mempertanggung jawabkan keputusan/kebijakan terhadap masyarakat yang malas bayar PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 54 responden (22,69%) yang menyatakan Setuju sebanyak 135 responden (56,72%), yang menyatakan Netral sebanyak 38 responden (15,97%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 9 responden (3,78%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa apakah kepala desa berpengaruh dalam mempertanggung jawabkan keputusan/kebijakan terhadap masyarakat yang malas bayar PBB sebanyak 135 responden (56,72%).

Tabel 4.14 Kepala desa selalu memberi penjelasan yang cukup terkait alasan di balik keputusan mengenai PBB

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	63	26,47
2	Setuju	113	47,48
3	Netral	50	21,00
4	Tidak Setuju	11	4,63
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala desa selalu memberi penjelasan yang cukup terkait alasan di balik keputusan mengenai PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 63 responden (26,47%) yang menyatakan Setuju sebanyak 113 responden (47,48%), yang menyatakan Netral sebanyak 50 responden (21,00%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,63%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Kepala desa selalu memberi penjelasan yang cukup terkait alasan di balik keputusan mengenai PBB sebanyak 113 responden (47,48%).

Tabel 4.15 Apresiasi yang diberikan kepala Desa seperti sertifikat penghargaan atas kepatuhan sebagai WP membuat saya termotivasi untuk membayar PBB.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	62	26,05
2	Setuju	110	46,22
3	Netral	53	22,27
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Apresiasi yang diberikan kepala Desa seperti sertifikat penghargaan atas kepatuhan sebagai WP membuat saya termotivasi untuk membayar PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 62 responden (26,05%) yang menyatakan Setuju sebanyak 110 responden (46,22%), yang menyatakan Netral sebanyak 53 responden (22,27%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Apresiasi yang diberikan kepala Desa

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

seperti sertifikat penghargaan atas kepatuhan sebagai WP membuat saya termotivasi untuk membayar PBB sebanyak 110 responden (46,22%).

Tabel 4.16 Kepala desa memberikan apresiasi terhadap partisipasi warga dalam membayar pajak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	66	27,73
2	Setuju	101	42,44
3	Netral	43	18,07
4	Tidak Setuju	27	11,34
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala desa memberikan apresiasi terhadap partisipasi warga dalam membayar pajak. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 66 responden (27,73%) yang menyatakan Setuju sebanyak 101 responden (42,44%), yang menyatakan Netral sebanyak 43 responden (18,07%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 27 responden (11,34%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Kepala desa memberikan apresiasi terhadap partisipasi warga dalam membayar pajak sebanyak 101 responden (42,44%).

Tabel 4.17 Kepala desa dapat memberikan inspirasi kepada warga untuk tepat waktu membayar pajak.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	74	31,09
2	Setuju	97	40,76
3	Netral	42	17,65
4	Tidak Setuju	24	10,08
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepala desa dapat memberikan inspirasi kepada warga untuk tepat waktu membayar pajak. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 74 responden (31,09%) yang menyatakan Setuju sebanyak 97 responden (40,76%), yang menyatakan Netral sebanyak 42 responden (17,62%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 24 responden (10,08%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Kepala desa dapat memberikan inspirasi kepada warga untuk tepat waktu membayar pajak sebanyak 97 responden (40,76%).

Tabel 4.18 Apakah kepala desa aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membayar PBB.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	73	30,67
2	Setuju	109	45,80
3	Netral	43	18,07
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Apakah kepala desa aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membayar PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 73 responden (30,67%) yang menyatakan Setuju sebanyak 109 responden (45,80%), yang menyatakan Netral sebanyak 43 responden (18,07%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Apakah kepala desa aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membayar PBB sebanyak 109 responden (45,80%).

Tabel 4.19 apakah kepala desa berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk pembayaran PBB

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	66	27,73
2	Setuju	120	50,42
3	Netral	38	15,97
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	3	1,26
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai apakah kepala desa berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk pembayaran PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 66 responden (27,73%) yang menyatakan Setuju sebanyak 120 responden (50,42%), yang menyatakan Netral sebanyak 38 responden (15,97%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju 3 responden (1,26%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa apakah kepala desa berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk pembayaran PBB sebanyak 120 responden (50,42%).

Tabel 4.20 Kepemimpinan kepala desa yang inspiratif dan taat kepada kewajibannya seperti membayar PBB membuat saya termotivasi untuk membayar PBB

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	82	34,45
2	Setuju	107	44,96
3	Netral	28	11,77
4	Tidak Setuju	20	8,40
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Kepemimpinan kepala desa yang inspiratif dan taat

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kepada kewajibannya seperti membayar PBB membuat saya termotivasi untuk membayar PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 82 responden (34,45%) yang menyatakan Setuju sebanyak 107 responden (44,96%), yang menyatakan Netral sebanyak 32 responden (11,77%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 20 responden (8,40%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Kepemimpinan kepala desa yang inspiratif dan taat kepada kewajibannya seperti membayar PBB membuat saya termotivasi untuk membayar PBB sebanyak 107 responden (44,96%).

b. Analisis Variabel Moralitas (X_2)

Hasil rekapitulasi frekuensi jawaban responden mengenai item yang berkaitan dengan variabel Moralitas dimana pernyataan sebanyak 9 butir. Untuk mengetahui masing masing jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban dihitung dengan menggunakan program SPSS 26.0 For Window, dan untuk masing masing jawaban responden diberi skore berdasarkan skala likert sebagai berikut:

Tabel 4.21 Tunduk/mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang tidak melanggar etika.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	81	34,03
2	Setuju	110	46,22
3	Netral	32	13,45
4	Tidak Setuju	13	5,46
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
	Total	238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Tunduk/mengikuti semua hak dan kewajiban

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perpajakan merupakan tindakan yang tidak melanggar etika. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 81 responden (34,03%) yang menyatakan Setuju sebanyak 110 responden (46,22%), yang menyatakan Netral sebanyak 32 responden (13,45%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 13 responden (5,46%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Tunduk/mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang tidak melanggar etika sebanyak 110 responden (46,22%).

Tabel 4.22 Saya merasa tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika saya tahu bahwa beberapa orang lain tidak membayar pajak dengan benar.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	63	26,47
2	Setuju	111	46,64
3	Netral	41	17,23
4	Tidak Setuju	20	8,40
5	Sangat Tidak Setuju	3	1,26
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya merasa tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika saya tahu bahwa beberapa orang lain tidak membayar pajak dengan benar. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 63 responden (26,47%) yang menyatakan Setuju sebanyak 111 responden (46,64%), yang menyatakan Netral sebanyak 41 responden (17,23%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 20 responden (8,40%), Sangat Tidak Setuju 3 responden (1,26%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya merasa tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika saya tahu bahwa beberapa orang lain tidak membayar pajak dengan benar sebanyak 111 responden (46,64%).

Tabel 4.23 Saya percaya bahwa orang yang melanggar etika dalam pembayaran PBB seharusnya dihukum atau diberi sanksi.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	75	31,51
2	Setuju	110	46,22
3	Netral	38	15,97
4	Tidak Setuju	13	5,46
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya percaya bahwa orang yang melanggar etika dalam pembayaran PBB seharusnya dihukum atau diberi sanksi. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 75 responden (31,51%) yang menyatakan Setuju sebanyak 110 responden (46,22%), yang menyatakan Netral sebanyak 38 responden (15,97%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 13 responden (5,46%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya percaya bahwa orang yang melanggar etika dalam pembayaran PBB seharusnya dihukum atau diberi sanksi sebanyak 110 responden (46,22%).

Tabel 4.24 Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	68	28,57
2	Setuju	122	51,26
3	Netral	37	15,55
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kewajiban perpajakan. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 68 responden (28,57%) yang menyatakan Setuju sebanyak 122 responden (51,26%), yang menyatakan Netral sebanyak 44 responden (15,55%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), dan Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebanyak 122 responden (51,26%).

Tabel 4.25 Saya merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	70	29,41
2	Setuju	106	44,54
3	Netral	44	18,49
4	Tidak Setuju	16	6,72
5	Sangat Tidak Setuju	2	0,84
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 70 responden (29,41%) yang menyatakan Setuju sebanyak 106 responden (44,54%), yang menyatakan Netral sebanyak 44 responden (18,49%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 16 responden (6,72%), Sangat Tidak Setuju 2 responden (0,84%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya sebanyak 106 responden (44,54%).

Tabel 4.26 Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	70	29,41
2	Setuju	109	45,80
3	Netral	43	18,06
4	Tidak Setuju	16	6,73
5	Sangat Tidak Setuju	0	0

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Total	238	100
-------	-----	-----

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 70 responden (29,41%) yang menyatakan Setuju sebanyak 109 responden (45,80%), yang menyatakan Netral sebanyak 43 responden (18,06%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 16 responden (6,73%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebanyak 109 responden (45,80%).

Tabel 4.27 Tidak adanya pejabat yang korupsi atau melakukan tugasnya dengan baik.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	56	23,53
2	Setuju	98	41,18
3	Netral	43	18,06
4	Tidak Setuju	38	15,97
5	Sangat Tidak Setuju	3	1,26
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Tidak adanya pejabat yang korupsi atau melakukan tugasnya dengan baik. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 56 responden (23,53%) yang menyatakan Setuju sebanyak 98 responden (41,18%), yang menyatakan Netral sebanyak 43 responden (18,06%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 38 responden (15,97%), Sangat Tidak Setuju 3 responden (1,26%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Tidak adanya pejabat yang korupsi atau melakukan tugasnya dengan baik sebanyak 98 responden (41,18%).

Tabel 4.28 Saya percaya bahwa dana yang saya keluarkan untuk wajib pajak digunakan sebagaimana mestinya.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	58	24,37
2	Setuju	121	50,84
3	Netral	44	18,49
4	Tidak Setuju	14	5,88
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya percaya bahwa dana yang saya keluarkan untuk wajib pajak digunakan sebagaimana mestinya. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 58 responden (24,37%) yang menyatakan Setuju sebanyak 121 responden (50,84%), yang menyatakan Netral sebanyak 44 responden (18,49%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 14 responden (5,88%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya percaya bahwa dana yang saya keluarkan untuk wajib pajak digunakan sebagaimana mestinya sebanyak 121 responden (50,84%).

Tabel 4.29 Saya merasa sistem perpajakan termasuk pembayaran PBB, sudah cukup jelas dan mudah dipahami.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	64	26,89
2	Setuju	121	50,84
3	Netral	36	15,13
4	Tidak Setuju	17	7,14
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya merasa sistem perpajakan termasuk pembayaran PBB, sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 64 responden (26,89%) yang menyatakan Setuju sebanyak 121 responden (50,84%), yang menyatakan Netral sebanyak 36 responden (15,13%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 17 responden

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

(7,14%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju Saya merasa sistem perpajakan termasuk pembayaran PBB, sudah cukup dan mudah dipahami sebanyak 121 responden (50,84%).



c. Analisis Variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3)

Hasil rekapitulasi frekuensi jawaban responden mengenai item yang berkaitan dengan variabel Moralitas dimana pernyataan sebanyak 6 butir. Untuk mengetahui masing masing jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban dihitung dengan menggunakan program SPSS 26.0 For Window, dan untuk masing masing jawaban responden diberi skore berdasarkan skala likert sebagai berikut:

Tabel 4.30 Pendidikan formal membantu memberi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	82	34,45
2	Setuju	111	46,64
3	Netral	30	12,61
4	Tidak Setuju	14	5,88
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Pendidikan formal membantu memberi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 82 responden (34,45%) yang menyatakan Setuju sebanyak 111 responden (46,64%), yang menyatakan Netral sebanyak 30 responden (12,61%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 14 responden (5,88%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Pendidikan formal membantu memberi pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan sebanyak 111 responden (46,64%).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tabel 4.31 Pendidikan saya yang berkaitan dengan ekonomi memberi saya pemahaman lebih baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	62	26,05
2	Setuju	126	52,94
3	Netral	37	15,55
4	Tidak Setuju	13	5,46
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Pendidikan saya yang berkaitan dengan ekonomi memberi saya pemahaman lebih baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 62 responden (26,05%) yang menyatakan Setuju sebanyak 126 responden (52,94%), yang menyatakan Netral sebanyak 37 responden (15,55%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 13 responden (5,46%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Pendidikan saya yang berkaitan dengan ekonomi memberi saya pemahaman lebih baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 126 responden (52,94%).

Tabel 4.32 Pendidikan yang saya terima memengaruhi cara saya memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, termasuk membayar PBB.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	98	41,18
2	Setuju	89	37,39
3	Netral	36	15,13
4	Tidak Setuju	15	6,30
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Pendidikan yang saya terima memengaruhi

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

cara saya memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, termasuk membayar PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 98 responden (41,18%) yang menyatakan Setuju sebanyak 100 responden (37,39%), yang menyatakan Netral sebanyak 38 responden (15,13%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 15 responden (6,30%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan sangat setuju bahwa Pendidikan yang saya terima memengaruhi cara saya memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, termasuk membayar PBB sebanyak 98 responden (41,18%).

Tabel 4.33 Saya merasa lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban membayar PBB berkat pengetahuan yang saya peroleh dari jurusan saya.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	88	36,97
2	Setuju	100	42,02
3	Netral	38	15,97
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya merasa lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban membayar PBB berkat pengetahuan yang saya peroleh dari jurusan saya. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 88 responden (36,97%) yang menyatakan Setuju sebanyak 100 responden (42,02%), yang menyatakan Netral sebanyak 38 responden (15,97%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju sebanyak 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya merasa lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban membayar PBB berkat pengetahuan yang saya peroleh dari jurusan saya sebanyak 100 responden (42,02%).

d. Analisis Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Hasil rekapitulasi frekuensi jawaban responden mengenai item yang berkaitan dengan variabel Moralitas dimana pernyataan sebanyak 12 butir. Untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengetahui masing masing jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban dihitung dengan menggunakan program SPSS 26.0 For Windows untuk masing masing jawaban responden diberi skore berdasarkan skala Likert sebagai berikut:

Tabel 4.34 Saya mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	88	36,98
2	Setuju	113	47,48
3	Netral	24	10,08
4	Tidak Setuju	13	5,46
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 88 responden (36,98%) yang menyatakan Setuju sebanyak 113 responden (47,48%), yang menyatakan Netral sebanyak 24 responden (10,08%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 13 responden (5,46%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku sebanyak 113 responden (47,48%).

Tabel 4.35 Saya menyetorkan SPT tahunan tepat waktu atau tidak melebihi jatuh tempo.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	62	26,05
2	Setuju	132	55,46
3	Netral	30	12,61
4	Tidak Setuju	13	5,46
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya menyetorkan SPT tahunan tepat waktu atau tidak melebihi jatuh tempo menyatakan Sangat Setuju sebanyak 62 responden (26,05%) yang menyatakan Setuju sebanyak 132 responden (55,46%), yang menyatakan Netral sebanyak 30 responden (12,61%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 13 responden (5,46%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya menyetorkan SPT tahunan tepat waktu atau tidak melebihi jatuh tempo sebanyak 132 responden (55,46%).

Tabel 4.36 Saya selalu menerima SPPT dengan cermat dan memeriksa apakah semua informasi di dalamnya sudah benar sebelum membayar.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	86	36,13
2	Setuju	111	46,64
3	Netral	30	12,61
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya selalu menerima SPPT dengan cermat dan memeriksa apakah semua informasi di dalamnya sudah benar sebelum membayar. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 86 responden (36,13%) yang menyatakan Setuju sebanyak 111 responden (46,64%), yang menyatakan Netral sebanyak 30 responden (12,61%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya selalu menerima SPPT dengan cermat dan memeriksa apakah semua informasi di dalamnya sudah benar sebelum membayar sebanyak 111 responden (46,64%).

Tabel 4.37 Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan penunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	62	26,05
2	Setuju	121	50,84
3	Netral	37	15,55
4	Tidak Setuju	17	7,14
5	Sangat Tidak Setuju	1	0,42
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan penunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 62 responden (26,05%) yang menyatakan Setuju sebanyak 121 responden (50,84%), yang menyatakan Netral sebanyak 37 responden (15,55%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 17 responden (7,14%), Sangat Tidak Setuju 1 responden (0,42%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan penunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak sebanyak 121 responden (50,84%).

Tabel 4.38 Saya selalu pembayaran PBB tepat waktu tanpa ada tunggakan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	80	33,61
2	Setuju	108	45,38
3	Netral	36	15,13
4	Tidak Setuju	14	5,88
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya selalu pembayaran PBB tepat waktu tanpa ada tunggakan. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 80 responden

Protected by PDF Anti-Copy Free

(33,61%) yang menyatakan Setuju sebanyak 108 responden (45,38%), yang menyatakan Netral sebanyak 36 responden (15,13%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 14 responden (5,88%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya selalu pembayaran PBB tepat waktu tanpa ada tunggakan sebanyak 108 responden (45,38%).

Tabel 4.39 Saya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	69	28,99
2	Setuju	117	49,16
3	Netral	36	15,13
4	Tidak Setuju	16	6,72
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 69 responden (28,99%) yang menyatakan Setuju sebanyak 117 responden (49,16%), yang menyatakan Netral sebanyak 36 responden (15,13%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 16 responden (6,72%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu sebanyak 117 responden (49,16%).

Tabel 4.40 Saya tepat waktu melaporkan spt tahunan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	68	28,57
2	Setuju	115	48,32
3	Netral	40	16,81
4	Tidak Setuju	15	6,30
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya tepat waktu melaporkan spt tahunan. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 68 responden (28,57%) yang menyatakan Setuju sebanyak 115 responden (48,32%), yang menyatakan Netral sebanyak 40 responden (16,81%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 15 responden (6,30%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya tepat waktu melaporkan spt tahunan sebanyak 115 responden (48,32%).

Tabel 4.41 Saya memiliki surat sertifikat tanah yang sah sebagai bukti kepemilikan properti yang saya bayar PBB-nya.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	84	35,29
2	Setuju	115	48,32
3	Netral	28	11,77
4	Tidak Setuju	11	4,62
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya memiliki surat sertifikat tanah yang sah sebagai bukti kepemilikan properti yang saya bayar PBB-nya. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 84 responden (35,29%) yang menyatakan Setuju sebanyak 115 responden (48,32%), yang menyatakan Netral sebanyak 28 responden (11,77%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 11 responden (4,62%), Sangat Tidak Setuju tidak ada responden, responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya memiliki surat sertifikat tanah yang sah sebagai bukti kepemilikan properti yang saya bayar PBB-nya sebanyak 115 responden (48,32%).

Tabel 4.42 Saya percaya bahwa sertifikat tanah adalah salah satu dokumen penting yang mempengaruhi kewajiban saya untuk membayar PBB.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju	92	38,66

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2	Setuju	99	41,60
3	Netral	33	13,86
4	Tidak Setuju	8	3,36
5	Sangat Tidak Setuju	6	2,52
Total		238	100

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 20 (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa dari jawaban hasil kuesioner yang diberikan mengenai Saya percaya bahwa sertifikat tanah adalah salah satu dokumen penting yang mempengaruhi kewajiban saya untuk membayar PBB. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 92 responden (38,66%) yang menyatakan Setuju sebanyak 99 responden (41,60%), yang menyatakan Netral sebanyak 33 responden (13,86%), yang menyatakan Tidak Setuju sebanyak 8 responden (3,36%), Sangat Tidak Setuju 6 responden (2,52%), responden yang paling dominan menyatakan setuju bahwa Saya percaya bahwa sertifikat tanah adalah salah satu dokumen penting yang mempengaruhi kewajiban saya untuk membayar PBB sebanyak 99 responden (41,60%).

4.2.4 Uji Asumsi Klasik.

a. Uji Normalitas.

Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistic parametric, jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistic non parametric.

- 1) Nilai signifikansi atau profitabilitas $< 0,05$ maka data terdistribusi secara tidak normal.
- 2) Nilai signifikansi atau profitabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi secara normal.

Tabel 4.45 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		238
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

	Std. Deviation		2,85940718
Most Extreme Differences	Upper		,060
	Lower		,038
	Two-Tailed		-,060
Test Statistic			,060
Asymp. Sig. (2-tailed)			,036 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,342 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,329
		Upper Bound	,354

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.
- Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Hasil test of normality diata menunjukkan bahwa sig memiliki nilai yaitu 0,000. Karena nilai 0,354 > 0,05 maka variabel bebas dan terikat memiliki distribusi data yang normal.

b. Uji Linieritas

Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas akan menentukan teknik-teknik analisa yang akan dipakai bisa digunakan atau tidak. Apabila dari hasil uji linearitas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear maka data penelitian dapat digunakan.

Tabel 4.46 Hasil Uji Linieritas antara Kepemimpinan Kepala Desa dan Kepatuhan Membayar Pajak.

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan	Between	(Combined)	5735,393	28	204,835	24,850	,000

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Membayar Pajak *	Groups	Linearity	4937,151	1	4937,151	598,965	,000
	Kepemimpinan Kepala Desa	Deviation		798,242	27	29,565	3,587
With			1722,745	209	8,243		
Total			7458,139	237			

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Uji linieritas pada variabel kepemimpinan kepala desa diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan linierity sebesar 0,000, karena signifikan kurang dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, sedangkan sig deviation from linierity sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel kepemimpinan kepala desa (X1) dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Tabel 4.47 Hasil Uji Linieritas antara Moralitas dan Kepatuhan Membayar Pajak .

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Membayar Pajak * Moralitas	Between Groups	(Combined)	5501,158	23	239,181	26,155	,000
		Linearity	4239,299	1	4239,299	463,576	,000
		Deviation from Linearity	1261,858	22	57,357	6,272	,000
	Within Groups		1956,981	21	9,145		
	Total		7458,139	23			


Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Uji linieritas pada variabel Moralitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan linierity sebesar 0,000, karena signifikan kurang dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, sedangkan sig deviation from linierity sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel Moralitas (X2) dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tabel 4.48 Hasil Uji Linieritas antara Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak.


OVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Membayar Pajak * Latar Belakang Pendidikan	Between Groups	(Combined)	5424,551	12	452,046	50,015	,000
		Linearity	4357,254	1	4357,254	482,095	,000
		Deviation from Linearity	1067,297	11	97,027	10,735	,000
	Within Groups		2033,588	225	9,038		
	Total		7458,139	237			

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025).

Uji linieritas pada variabel Latar Belakang Wajib Pajak diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan linierity sebesar 0,000, karena signifikan kurang dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, sedangkan sig deviation from linierity sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

4.2.5 Teknik Analisis Data

a. Uji Regresi Sederhana

analisis regresi linier sederhana merupakan Teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dari satu variabel bebas (variabel independent)

Tabel 4.49 variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Coefficients^a

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)		1,463		3,725	,000
	Kepemimpinan Kepala Desa		,030	,814	21,499	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025).

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan regresi linier sederhana, diperoleh nilai $b=0,650$ sedangkan nilai constant $(a)=5.451$ Dari hasil output SPSS nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$\text{Kepatuhan} = 5,451 + 0,650X$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh nilai $a = 5,451$ dan nilai $b = 0,650X$. dari persamaan nilai estimasi fungsi regresi diatas terlihat bahwa nilai konstanta yang diperoleh oleh variabel bebas kompensasi financial adalah sebesar $\beta / a = 0,650$

Tabel 4.50 Variabel Moralitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,274	1,792		2,944	,004
	Moralitas	,881	,050	,754	17,630	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025).

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan regresi linier sederhana, diperoleh nilai $b=0,881$ sedangkan nilai constant $(a)=5.274$ Dari hasil output SPSS nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$Y = a + bX$$

$$\text{Kepatuhan} = 5,274 + 0,881X$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh nilai $a = 5,274$ dan nilai $b = 0,881X$. dari persamaan nilai estimasi fungsi regresi di atas terlihat bahwa nilai konstanta yang diperoleh oleh variabel bebas kompensasi financial adalah sebesar $\beta/a = 0,881$

Tabel 4.51 Variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,333	1,406		8,061	,000
	Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak	1,546	,085	,764	18,210	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan dari data tabel di atas dapat diketahui hasil perhitungan regresi linier sederhana, diperoleh nilai $b = 1,546$ sedangkan nilai constant (a) = 11,333. Dari hasil output SPSS nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$\text{Kepatuhan} = 11,333 + 1,546X$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh nilai $a = 11,333$ dan nilai $b = 1,546X$. dari persamaan nilai estimasi fungsi regresi di atas terlihat bahwa nilai konstanta yang diperoleh oleh variabel bebas kompensasi financial adalah sebesar $\beta/a = 1,546$

b. Uji Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

membedakan antara variabel dependen dengan variabel independent.

Teknik kerelasi yang digunakan adalah *korelasi pearson product moment*.

Tabel 4.52 tingkat korelasi dan kekuatan hubungan.

Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,1000	Sangat Kuat

Tabel 4.53 Hasil Perhitungan Koefisien Kepemimpinan Kepala Desa

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,814 ^a	,662	,661	3,268

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Desa

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh besarnya nilai R adalah 0,814 yang berarti hubungan antara Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X1) dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menunjukkan hubungan korelasi antara X dan Y searah.

Tabel 4.54 Hasil Perhitungan Koefisien Moralitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,754 ^a	,568	,567	3,693

a. Predictors: (Constant), Moralitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh besarnya nilai R adalah 0,754 yang berarti hubungan antara Variabel Moralitas (X2)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menunjukkan hubungan korelasi antara X dan Y searah.

Tabel 4.55 Hasil Perhitungan Koefisien Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,764 ^a	,584	,582	3,625

a. Predictors: (Constant), Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh besarnya nilai R adalah 0,764 yang berarti hubungan antara Variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X1) dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menunjukkan hubungan korelasi antara X dan Y searah.

c. Uji t

Untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas yaitu kepemimpinan kepala desa terhadap variabel terkait yaitu kepatuhan membayar pajak. Dapat dijelaskan dengan menggunakan uji t. Hasil uji t secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.56 hasil uji t (Pengujian Hipotesis X1 dan Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,451	1,463		3,725	,000
	Kepemimpinan Kepala Desa	,650	,030	,814	21,499	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X₁) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas bahwa nilai t_{hitung} 3.725 lebih besar dari $t_{tabel} = 1,970$ serta nilai sig 0,000 > 0,05 maka ada pengaruh signifikan Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X₁) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Tabel 4.57 Hasil Uji t (Pengujian Hipotesis X2 dan Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,274	1,792		2,944	,004
	Moralitas	,881	,050	,754	17,630	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa variabel Moralitas (X₂) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas bahwa nilai t_{hitung} 2.944 lebih besar dari $t_{tabel} = 1.970$, serta nilai sig 0,000 > 0,05 maka ada pengaruh signifikan Variabel Moralitas (X₂) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Tabel 4.58 Hasil Uji t (Pengujian Hipotesis X3 dan Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,333	1,406		8,061	,000
	Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak	1,546	,085	,764	18,210	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.55, menjelaskan bahwa variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas bahwa nilai t_{hitung} 8.061 lebih besar dari $t_{tabel} = 1.970$ serta nilai sig $0,000 > 0,05$ maka ada pengaruh signifikan Variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

d. Uji Regresi linier berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persamaan regresi linier berganda dan menghitung besarnya pengaruh Kepemimpinana Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Dari hasil kuisisioner yang disebarakan kepada 238 responden diperoleh jawaban dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS ver.26 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.59 hasil pengujian Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,186	1,436		,826	,410
	Kepemimpinan Kepala Desa	,315	,048	,394	6,497	,000
	Moralitas	,286	,063	,245	4,545	,000
	Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak	,622	,104	,308	6,011	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
 Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel Kepemimpinan Kepala Desa (X_1) Moralitas (X_2) Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak (X_3) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Dari hasil olahan data SPSS 26 diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian Regresi Linier Berganda diperoleh Persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 1.186 + 315 \text{ Kepemimpinan Kepala Desa} + 286 \text{ Moralitas} + 622 \text{ Latar Belakang Pendidikan}$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta yaitu 1.186. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kepemimpinan kepala desa, moralitas dan latar belakang wajib pajak tidak mengalami perubahan atau nilainya nol, maka nilai dari variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 1.186.
- b) Nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan kepala desa sebesar 315 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai variabel kepemimpinan kepala desa meningkat satu satuan, maka nilai variabel kepemimpinan kepala desa akan mengalami perubahan positif sebesar 315 satuan. Sebaliknya jika nilai regresi 315 turun sebesar satu satuan, maka kepatuhan membayar pajak juga di prediksi mengalami penurunan sebesar 315 satuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa mempunyai hubungan yang searah terhadap kepatuhan membayar pajak.
- c) Nilai koefisien regresi variabel moralitas sebesar 286 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Moralitas meningkat satu satuan, maka nilai variabel Moralitas akan mengalami perubahan positif sebesar 286 satuan. Sebaliknya jika nilai regresi 286 turun sebesar satu satuan, maka kepatuhan membayar pajak juga di prediksi mengalami penurunan sebesar 286 satuan. Oleh karena itu

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dapat disimpulkan bahwa Moralitas mempunyai hubungan yang searah terhadap kepatuhan membayar pajak.

- d) Nilai koefisien regresi variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak sebesar 622 satuan ini menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak meningkat satu satuan, maka nilai variabel Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak akan mengalami perubahan positif sebesar 622 satuan. Sebaliknya jika nilai regresi 622 turun sebesar satu satuan, maka kepatuhan membayar pajak juga di prediksikan mengalami penurunan sebesar 622 satuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak mempunyai hubungan yang searah terhadap kepatuhan membayar pajak.

e. Uji Koefisien Determinan

Koefisien Determinanan (R^2) Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel dependen. Nilai koefisien determinan (R^2) adalah anatar nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinan sama dengan nol maka variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika koefisien mendekati angka 1, maka variabel independent berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini maka diusakan minimum R^2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

Tabel 4.60 hasil pengujian koefisien determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,860 ^a	,740	,737	2,878

a. Predictors: (Constant), Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak, Moralitas, Kepemimpinan Kepala Desa

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (2025)

Dari hasil perhitungan koefisien determinan sebesar R^2 (R square) 0,740 kuadrat maka dikalikan 100% didapatkan nilai sebesar 74,0% artinya Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas, dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak secara bersama-sama memberi kontribusi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

f. Uji F

Uji secara Simultan atau uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas yaitu kepemimpinan kepala desa moralitas dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak Variabel terikat secara bersama-sama atau simultan hasil uji F secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.61 hasil pengujian uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5520,377	3	1840,126	222,210	,000 ^b
	Residual	1937,762	234	8,281		
	Total	7458,139	237			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak, Moralitas, Kepemimpinan Kepala Desa

Sumber: Hasil Olah Data, SPSS 26 (2025).

Berdasarkan tabel 4.61 di atas pengujian dengan SPSS 26 dapat dilihat bahwa F_{hitung} yang diperoleh sebesar $222,210 > F_{tabel} = 2,643$ dan tingkat kemaknaan secara simultan signifikannya adalah $0,000 < 0,05$. sehingga menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas yaitu kepemimpinan kepala desa moralitas dan latar belakang pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel terikat kepatuhan membayar pajak jadi terbukti kebenarannya dan hipotesisnya dapat diterima.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan kepala desa, moralitas dan latar belakang Pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

5.2 SARAN

Saran yang saya berikan dari penelitian ini dijadikan acuan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas adalah pemerintah desa lebih sering mengadakan sosialisasi dengan masyarakat terkait pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB).

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia suma, jibraih ahmad. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh. 2, 40–46.
- Akhmad Syarifudin. (2018). buku ajar perpajakan.
- Annaas Aqsha. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7), 1–17.
- Aristanti Widyaningsih. (2015). hukum pajak dan perpajakan.
- Dewi, S. K., & Hidayatullah, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mendorong Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Bantul Untuk Membayar PBB P2. 11 (2), 147–161.
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Faridah ara, U. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Fujiawati, N., & Rahmi, H. (2024). *Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong*.
- Hamidah, J., & Novien, R. (2023). *perpajakan*.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 132–138. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1063>

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- Hilda, R. N., Sudaryanti, D., & Fakhriyyah, D. D. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(2), 1054–1060.
- Hirani, E., & Silalahi, A. D. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan*, 1(1), 23–28.
- Kasturi, M., Fatimah, S., & Sriningsih, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. *10(2)*, 87–99.
- Khaerunnisa, I., Wiratno, A., & Classification, J. E. L. (n.d.). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak INFO ARTIKEL. *1(2)*, 211–224.
- Mardiasmo. (2018). *perpajakan*.
- Melyanti, S., Hasan, M., & Dinar, M. (2019). Perpajakan. In *Universitas Negeri Makassar*.
- Momuat, P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 701–710.
- Nim, I. N. O. W. W., Yuesti, A., & Sudiartana, M. (2019). Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 408–449.
- Patty, Agustina C., & Tehuyao, D. B. (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi. *3(1)*, 293–302.
- Reza, W. (2021). *analisis regresi*.
- Rimbano, D., Sardiyo, Famalika, A., Nadziro, N., & Diana, henny satria. (2022). Metodologi Penelitian. In *Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)*. www.rcipress.rcipublisher.org
- Sahir, syafrida hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

samosir, magdalena S., Obon, W., & Narek, Y. B. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Kota (Pbb P2) Di Desa Blata Tatin, Kecamatan Kangae. *Projemen UNIPA*, 10(1), 18–32. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i1.32>

Sari, W. E., Fahmi, M., Kusuma, G. S. M., & Zuraidah, I. (2024). Pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Owner*, 8(1), 828–838. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1617>

Setyo Budiwanto. (2017). *metode statistika*.

Sihombing Sotarduga, Sibagariang Alestriani Susy. (2020). *perpajakan*.

Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). *Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19*. 16(2), 225–234.

Tapatfeto, J. D., Nafi, S. I., & Seliamang, Y. M. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2*. 2(2), 58–74.

Utami, F. P., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Endah). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 840–852. <http://202.93.229.169/index.php/jrap/article/view/689#>

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, & Khairunnisa. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Lampiran

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Lampiran 1 surat izin penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

YAYASAN PENDIDIKAN DWI TUNGGAL PALEMBANG
UNIVERSITAS BINA INSAN
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Lubuklinggau, 26 Oktober 2024

PDF

Nomor : 1129/UNIV. 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Madang

di-
Tempat


Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima Mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Rani Destiana
NIM : 2101020079
Program studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas)

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin .

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora,

Assoc. Prof. Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si
NIDN: 0210078701


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (Sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan (Sebagai Laporan)
3. Arsip

0733-4553932 (Rektorat Universitas Bina Insan)
0733-3280300 (Pascasarjana)
0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
Admin@univbinsan.ac.id univbinsan.ac.id pasca.univbinsan.ac.id

Lampiran 2 lembar bimbingan

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



LEMBAR BUKU PROPOSALSKRIPSI

Nama: Rani D
 Nim: 21010200
 Pembimbing 1: Eri Tihar-tah, SE, M.Si
 Pembimbing 2: Dian Wulan Sari, S.E., M.Ak
 Judul: Pengaruh Kepemimpinan Kepala desa, merakitas, latar Belakang Pendidikan Wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus kec. Sumber Harta Kab. Musi rawas).

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1.	12/10/2024		Acc judul.		
2.	3/11/2024		Bab 1. Revisi mayor.		
3.	10/11/2024		Revisi Bab 1 dan 2. Revisi mayor, Teknik penulisan etc.		
4.	17/11/2024		Revisi Bab 1 dan 2. - Revisi minor. - Daftar pustaka. - Daftar Kuisiner - Etc.		
5.	1/12/2024		Acc lanjut bimbingan ke B		
6.	5/12/24	Proposal	Perbaiki bentuk tabel. Penulisan pre nomor - latar belakang wawancara		
7.	12/12/24	Propom	Pastikan Objek, Data R.M dll		
8.	23/12/24	Preper	Acc utk Japh Seming		

Lubuklinggau, 03-12-2024
 Ketua Program Studi Akuntansi
 (Indrawati Mara Kesuma, SE, M.Si)

Lampiran 3 wawancara

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Ibu pardiah:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama menjadi warga desa	Kurang lebih 40 th
2	Apakah kepala desa sering berinteraksi dengan masyarakat mengenai kebijakan PBB?	Tidak pernah
3	Apakah kepala desa sering menegaskan pembayaran PBB	Tidak pernah karena itu menurut kesadaran kita masing masing.
4	Apakah anda selalu membayar pajak tepat waktu?	Tidak tentu terkadang telat karna keuangan juga tidak selalu ada.
5	Kapan terakhir kepala desa mengadakan sosialisasi mengenai PBB?	Saya tidak tahu karna itu sudah sangat lama tidak mengadakan sosialisasi.
6	Apakah anda tahu mengenai perhitungan PBB atas property yang harus dibayar?	Tidak tahu, karena saya bayar pajak sesuai dengan apa yang diminta kalua untuk perhitungan saya kurang tahu

Ibu Asnaini:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama menjadi warga desa?	25 tahun.
2	Apakah kepala desa sering berinteraksi dengan masyarakat mengenai kebijakan PBB?	Tidak pernah
3	Apakah kepala desa sering menegaskan pembayaran PBB	Tidak pernah
4	Apakah anda selalu membayar pajak tepat waktu?	Sering kali telat kadang 10 hari sesudah koher dibagi baru saya bayar.
5	Kapan terakhir kepala desa mengadakan sosialisasi mengenai PBB?	Seingat saya selama 3 tahun ini tidak pernah.
6	Apakah anda tahu mengenai perhitungan PBB atas property yang harus dibayar?	Tidak tahu.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Ibu Fatmawati

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama menjadi warga desa	56 tahun
2	Apakah kepala desa sering berinteraksi dengan masyarakat mengenai kebijakan PBB?	Tidak pernah
3	Apakah kepala desa sering menegaskan pembayaran PBB	Tidak pernah karena itu menurut kesadaran kita masing masing.
4	Apakah anda selalu membayar pajak tepat waktu?	Tidak mesti, tergantung Namanya keuangan tidak dapat di prediksi kadang setelah 3 hari kemudian setelah koher dibagikan baru saya bayar.
5	Kapan terakhir kepala desa mengadakan sosialisasi mengenai PBB?	Tidak tahu karena sudah lama tidak melakukan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan.
6	Apakah anda tahu mengenai perhitungan PBB atas property yang harus dibayar?	Tidak tahu.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Ibu Aisyah:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama menjadi warga desa	Kurang lebih 30 th
2	Apakah kepala desa sering berinteraksi dengan masyarakat mengenai kebijakan PBB?	Tidak pernah
3	Apakah kepala desa sering menegaskan pembayaran PBB	Tidak pernah kadus hanya memberikan koher saja tidak menuntut harus membayar segera.
4	Apakah anda selalu membayar pajak tepat waktu?	Tidak, karena kadang waktu penarikan pajak bumi dan bangunan tidak ada uang jadi kadang terlambat 2 atau 3 hari.
5	Kapan terakhir kepala desa mengadakan sosialisasi mengenai PBB?	Tidak tahu karena sudah lama tidak adanya sosialisasi.
6	Apakah anda tahu mengenai perhitungan PBB atas property yang harus dibayar?	Tidak tahu.

Lampiran 3 Dokumentasi:

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

